



## Dekonstruksi dan Rekonstruksi Filsafat Kebijakan Merdeka Belajar Berbasis Ilmu Sosial Profetik Kuntowijoyo

Alif Rizky Ramadhan<sup>1</sup>, Amin Fauzi<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup> Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA

\* Email Koresponden: [aminfauzi@uhamka.ac.id](mailto:aminfauzi@uhamka.ac.id)

### ARTICLE INFO

Article history

Received: 23 Mei 2024

Accepted: 27 Mei 2024

Published: 31 Mei 2024

### Kata kunci:

Kurikulum Merdeka

Belajar

Ilmu Sosial Profetik

Dekonstruksi Derrida

### ABSTRAK

Kurikulum merdeka belajar merupakan sebuah kurikulum yang bertugas untuk melengkapi dan menyederhanakan kurikulum 2013. Namun dalam praktiknya, timbul berbagai problematika-problematika yang sangat teoritik hingga aplikatif. Hal ini terlihat dari bagaimana landasan filsafat yang berkembang dalam kurikulum ini sangat kental dengan pemahaman epistemologi barat yang mana dalam praktiknya lebih menekankan pada esensi pendidikan yang maju kedepan tanpa melihat akar-akar tradisi pendidikan yang ada. Dari hal di atas, penelitian ini akan mengkaji bagaimana perlunya sebuah upaya dekonstruksi terhadap kebijakan merdeka belajar yang berkembang saat ini. Lalu, penelitian ini juga mengkaji bagaimana hasil dekonstruksi tersebut dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan sebuah rekonstruksi terhadap filsafat asas-asas kebijakan kurikulum merdeka belajar melalui tinjauan berbasis epistemologi ilmu sosial profetik yang dibangun oleh Kuntowijoyo. Metodologi penelitian akan melalui pendekatan penelitian kualitatif dan studi kepustakaan, serta penggunaan teori dekonstruksi Derrida. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya dalam membangun kebijakan pendidikan nasional yang bernilai humanis, liberatif, transenden dalam pengaplikasiannya, diperlukan suatu asas kebijakan pendidikan yang juga meninjau dunia dalam perspektif teoantrposentrik antara keilahian dan kemanusiaan dalam segala aspek kehidupan. Kontribusi dari penelitian ini adalah upaya peneliti mencoba mengajukan sebuah hipotesis profetik dalam pembentukan asas-asas filsafat kebijakan merdeka belajar yang baru berbasis dengan pemikiran ilmu sosial profetik.

### ABSTRACT

The Merdeka Belajar curriculum is a curriculum that is tasked with complementing and simplifying the 2013 curriculum. However, in practice, various problems arise that are very theoretical to applicative. This can be seen from how the philosophical basis that develops in this curriculum is very thick with an understanding of western epistemology which in practice emphasizes the essence of forward-looking education without looking at the roots of existing educational traditions. From the above, this research will examine how the need for an effort to deconstruct the current Merdeka Belajar policy. Then, this research also examines how the results of the deconstruction are used as a basis for carrying out a reconstruction of the philosophy of the principles of the Merdeka Belajar curriculum policy through a review based on the prophetic social science epistemology built by Kuntowijoyo. The research methodology will

### Keyword:

Merdeka Belajar

Curriculum

Social Prophetic

Science

Derrida Deconstruction

---

be through a qualitative research approach and literature study, as well as the use of Derrida's deconstruction theory. The results of this study show that in building a national education policy that is humanist, liberative, transcendent in its application, an education policy principle is needed that also looks at the world in a theocentric perspective between divinity and humanity in all aspects of life. The contribution of this research is the researcher's effort to try to propose a hypothesis in the formation of the prophetic philosophical principles of the new Merdeka Belajar policy based on prophetic social science thought.

---

## Pendahuluan

Kurikulum merdeka belajar adalah sebuah kurikulum yang baru saja diterapkan di Indonesia untuk menggantikan kurikulum 2013 (Kemdikbud, 2022a) Kurikulum ini memiliki tujuan utama untuk memerdekakan pendidikan nasional dari berbagai macam kelemahan-kelemahan yang menyerang sendi-sendi pendidikan di Indonesia. (Sopiansyah et al., 2022) Kurikulum ini merupakan gagasan yang diinisiasi oleh menteri pendidikan Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi pada periode kedua 2019-2024, yaitu Nadiem Makarim. Hal ini dilakukan dengan harapan agar pendidikan nasional bisa setara dengan pendidikan internasional. (Vhalery et al., 2022)

Kurikulum merdeka belajar adalah kurikulum yang ditujukan untuk membebaskan peserta didik dari sistem yang mengekang mereka dalam mencapai kreativitas potensial mereka. (Yasmansyah, 2022) Kurikulum ini muncul sebagai upaya untuk menjawab isu-isu yang muncul dari sekolah tradisional yang hanya berbasis pada capaian akhir peserta didik, ketimbang perkembangan yang terjadi dalam proses pendidikan itu. (Fahmi, 2023) Maka untuk mencapai tujuan tersebut, dalam perkembangan kurikulum merdeka belajar banyak mengadakan program-program yang dinilai sesuai dengan kebutuhan peserta didik generasi Z. Hal ini dilihat dari kegiatan proyek di sekolah-sekolah yang mencoba mengintegrasikan beberapa bidang keilmuan sekaligus untuk menciptakan sebuah karya. (Anggara et al., 2023) Selain itu, kegiatan lain yang dikembangkan oleh tim kurikulum merdeka belajar bisa dilihat dari kegiatan pertukaran pelajar dalam negeri antar kampus, yang ditujukan untuk memperkenalkan budaya kampus yang berbeda dari setiap daerahnya. (Syahrir et al., 2023) Lalu, dalam rangka memperluas jangkauan kemampuan mahasiswa sebagai pendidik, maka tim penyelenggara mengadakan program merdeka mengajar yang mana mahasiswa dikirim ke berbagai daerah untuk menjadi tenaga didik dalam satu periode waktu untuk mengabdikan daerah tersebut. (Rochmiyati et al., 2023)

Dalam kurikulum merdeka belajar, kementerian pendidikan dan kebudayaan mengangkat Pancasila sebagai landasan utama dalam membangun paradigma filosofis pendidikan Indonesia. Hal ini termaktub dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) SISDIKNAS terbaru yang menyatakan bahwa, "nilai-nilai dari Pancasila merupakan sebuah landasan filosofis yang mendasar dari pendidikan nasional. Hal ini dirumuskan melalui pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945." (Kemdikbud, 2022b)

Merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Susilawati, kurikulum merdeka belajar menekankan pada aspek humanismenya melalui kegiatan-kegiatan MBKM yang diciptakan kementerian pendidikan dan kebudayaan. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan kemampuan yang relevan dalam menghadapi dunia modern, sehingga dibutuhkan penerapan nilai-nilai dari filsafat humanisme sebagai alur utama perkembangan pendidikan peserta didik. (Susilawati, 2021) Lalu dalam penelitian yang dilakukan oleh Nasution, dia berpendapat jika arah kurikulum merdeka belajar itu mencoba mengambil jalur humanisme yang tidak lain bertujuan mengembangkan nilai-nilai humanistik seseorang. Sehingga menurutnya, perlu adanya batasan yang konkrit untuk menjabarkan humanisme yang bisa diterima dan tidak dalam konteks-konteks pendidikan Islam. (Nasution, 2020) Terakhir, penelitian yang dikemukakan oleh Rohmah dan kawan-kawan menyatakan bahwa kurikulum merdeka belajar memberi ruang kesempatan yang didalamnya penuh akan kebebasan dan juga kenyamanan. Hal ini tidak terlepas dari filsafat humanisme yang melandasi argumentasi utama pembangunan kurikulum merdeka belajar itu sendiri. (Rohmah et al., 2022)

Dalam penelitian terdahulu, ditemukan sebuah korelasi mengenai metode Ilmu Sosial Profetik (ISP) yang dikembangkan oleh Kuntowijoyo dengan penyesuaian kaidah pendidikan yang dipraktikkan sekarang. Hal itu terlihat dari bagaimana konstruksi ISP yang dibangun oleh Kuntowijoyo mampu merangkai susunan tangga pendidikan yang tepat bagi kebijakan pendidikan di Indonesia. (Ramadhan & Lismawati, 2022) Namun terdapat hal yang tidak spesifik dibahas dalam penelitian sebelumnya. Hal itu tidak lain adalah bagaimana ISP menjawab problematika teoritis yang terdapat dalam kurikulum merdeka belajar ini.

Dalam teori yang dikembangkan Kuntowijoyo pada ISP, muncul postulat baru yang masih berhubungan dengan cara kerja ISP, yaitu pengilmuan Islam. Teori ini muncul untuk mencoba mendinamisasikan ilmu pengetahuan, agama, dan kebudayaan yang di era tersebut mengalami keguncangan lewat tulisan-tulisan Ismail Al-Faruqi dan Naquib Al-Attas mengenai islamisasi ilmu pengetahuan. (Kuntowijoyo, 2006) Kuntowijoyo menolak upaya mengislamkan ilmu pengetahuan, karena pada hakikatnya ilmu tersebut netral dan tidak ada tendensi apapun. Manusialah yang membeda-bedakannya sehingga ilmu pengetahuan atau epistemologi ini terbentuk bersesuaian dengan penggunaannya. Sehingga tidak perlu ilmu itu dipurifikasi, kecuali ilmu tersebut telah bertindak sombong dan melawan aturan hukum Allah. (Badar, 2020)

Dari beberapa penelitian yang dilakukan dalam diskursus kurikulum merdeka belajar, pengkajian penelitian yang menjadikan ilmu sosial profetik milik Kuntowijoyo sebagai dasar pembicaraan kurang banyak dijumpai (Faiz & Kurniawaty, 2020; Mawaddah & Roekhan, 2021; Susilawati, 2021). Terdapat satu penelitian yang mengkaji mengenai pendekatan profetik dalam kebijakan nasional yang memuat secara umum dinamika yang berkembang dalam kurikulum merdeka belajar (Ramadhan & Lismawati, 2022). Dari sini kita bisa melihat bahwa terdapat sebuah gap penelitian yang besar dalam diskursus kurikulum merdeka belajar dengan ilmu sosial profetik ini. Maka penelitian ini akan memperdalam kajian ini dengan meninjau sudut pandang filsafat kebijakan merdeka belajar dari perspektif ilmu sosial profetik.

Dari hal di atas maka, penelitian ini akan mengkaji perlunya sebuah upaya dekonstruksi terhadap kebijakan merdeka belajar yang berkembang saat ini. Lalu, setelah itu hasil dekonstruksi itu dijadikan sebagai landasan untuk melaksanakan sebuah rekonstruksi terhadap filsafat asas-asas kebijakan kurikulum merdeka belajar melalui tinjauan berbasis epistemologi ilmu sosial profetik yang dibangun oleh Kuntowijoyo dalam membangun kebijakan pendidikan nasional yang bernilai humanis, liberatif, transenden dalam pengaplikasiannya.

Penelitian ini akan meminjam beberapa teori diluar rumpun ilmu pendidikan yaitu: teori dekonstruksi milik Jacques Derrida yang muncul dalam dunia linguistik (Derrida, 2016). Sebagai sebuah teori yang akan digunakan untuk meruntuhkan kerangka sistem kebijakan pendidikan merdeka belajar yang sudah berkembang. Dan terakhir, digunakan ilmu sosial profetik milik Kuntowijoyo yang muncul dalam dunia sosiologi sebagai basis dari rekonstruksi terhadap kebijakan pendidikan merdeka belajar (Kuntowijoyo, 1994).

## Metode

Metodologi penelitian akan melalui pendekatan penelitian kualitatif dan studi kepustakaan, serta penggunaan teori dekonstruksi Derrida. Pengumpulan data akan berasal dari sumber-sumber primer yang diambil dari buku dan jurnal ilmiah, sementara sumber-sumber sekunder merupakan refleksi lapangan terhadap realita yang berkembang dalam diskursus kebijakan merdeka belajar. Serangkaian prinsip-prinsip filosofis yang lebih komprehensif dan relevan secara kontekstual yang dapat mengarahkan pembuatan kebijakan pendidikan yang lebih holistik akan menjadi lebih mudah dengan bantuan sintesis dari data-data tersebut.

Proses analisis dari penelitian ini adalah dengan memadukan dan meramu semua data primer kedalam sebuah susunan yang terstruktur dan ilmiah. Lalu setelah itu, data-data tersebut ditelaah dan didekonstruksi melalui model pendekatan Derrida. Hasil akhir data tersebut menjadi data primer yang disajikan. Sementara data skunder juga mengalami proses yang sama dengan merumuskan sebuah data yang padu dan ilmiah. Kedua data itu lalu diintegrasikan dan diobjektifikasikan sesuai dengan pendekatan ilmu sosial profetik milik Kuntowijoyo.

Penelitian ini bertujuan untuk mendefinisikan ulang kerangka kebijakan melalui evaluasi kritis dan analisis berulang yang sejalan dengan epistemologi ilmu sosial profetik. Tujuan akhirnya adalah untuk mengubah sistem pendidikan nasional sehingga dapat mencapai keseimbangan antara tuntutan industri dan pengembangan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan yang komprehensif.

## Hasil dan Pembahasan

### Arah dan Orientasi Filsafat Kebijakan Merdeka Belajar

Filsafat humanisme didefinisikan sebagai filsafat yang menekankan pada konstruksi bahwa manusia itu memiliki suatu kebebasan dalam mengeluarkan kreativitas dan kebhagaian mereka melalui beragam media. Hal ini pula yang membuat filsafat humanisme tidak membutuhkan suatu entitas ghaib, karena entitas itu memang tidak ada sama sekali. (Wardhana & Pratiwi, 2020) Konsep ini digambarkan lebih lanjut oleh Abraham Maslow sebagai suatu ihwal kemanusiaan bagi seorang insan untuk bisa memahami dan juga menerima dirinya ini sebisa mungkin. Sehingga Maslow memunculkan gagasan hierarki kebutuhan yang mencoba menggambarkan proses humanisme yang telah diapaparkan sebelumnya. (Sabaruddin, 2020)

pemikiran yang dikembangkan Maslow ini sejalan dengan humanisme pendidikan yang dikembangkan oleh Paulo Freire. Dalam pandangan Freire, pendidikan tidak lain merupakan sebuah upaya untuk mengenali dan memahami realitas diri seseorang sebagai manusia. Hal ini ditekankan karena manusia merupakan penguasa atau raja atas hidupnya sendiri dan bukan orang lain (Fadli, 2020; Freire, 1996; Maslow, 1958). konstruksi yang disampaikan diatas merupakan dasar-dasar gagasan filsafat humanisme dalam pendidikan secara umum yang dalam esensinya sangat menekankan penguasaan diri manusia seluas-luasnya dan tidak terikat oleh suatu entitas yang mengekang.

Dalam prosesnya ini pula, ide humanisme yang berkembang pada paruh modern ini datang dari penalaran yang dikembangkan oleh Carl Roger, yang mana dia berpendapat bahwa pendidikan itu harus membebaskan dan bukan malah membebankan peserta didik. Karena, pada hakikatnya manusia itu akan secara alami belajar mengenai sesuatu yang dipahami dan sukai. Sehingga unsur-unsur pemaksaan dan berbagai macamnya tersebut malah mendorong peserta didik menolak dan bahkan tidak menyukai materi pembelajaran (Rogers, 2000; Sumantri & Ahmad, 2019).

Setelah kita membahas humanisme, maka kita akan memasuki model filsafat lain yang berkembang di merdeka belajar. Filsafat progresivisme merupakan sebuah filsafat yang menekankan bahwa relevansi pembelajaran di waktu sekarang bisa saja berbeda dan berubah dalam waktu kedepan. Hal ini menekankan bahwa perkembangan pendidikan haruslah berjangka dan sesuai dengan perkembangan yang ada. Sehingga, merumuskan suatu rencana yang amat panjang itu bukanlah sebuah pertanyaan. (Utomo & Ifadah, 2020) Filsafat ini berkembang menjadi suatu pemahaman pragmatis yang menekankan pada realitas dibandingkan angan-angan yang tidak tercapai. Hal ini ditekankan oleh William James yang memahami bahwa manusia itu tidak bisa menilai suatu ukuran kebenaran dengan bersifat absolute. (Ahida, 2022; James, 2020) Sehingga pendidik harus melakukan pengamatan dan menilai secara mandiri suplemen-suplemen apa yang dibutuhkan peserta didik, karena setiap kelas memiliki konstruksi yang berbeda. (Thaib, 2018)

Ide yang dikembangkan oleh James ini juga ditekankan oleh John Dewey yang memahami bahwa pendidikan itu harus membaca ruang kekinian, sehingga peserta didik dapat mampu mengikuti pembelajaran karena setting pembelajarannya telah disesuaikan dengan kondisi mereka. (Hasbullah, 2020) Pada hakikatnya pendidikan merupakan wadah untuk mendisiplinkan peserta didik tanpa otoritas yang maha kuasa. Hal ini karena, suatu tindakan dalam pandangan Dewey tidak ada yang baik dan benar secara objektif. Artinya kebenaran yang ada saat ini merupakan suatu subjektifitas seorang pendidik yang dipaksakan kepada peserta didiknya. (Arifin, 2020; Dewey, 1964)

Konstruksi yang dibangun oleh Hans Vaihinger mengenai progresivisme melanjutkan wacana yang telah dimunculkan sebelumnya. Dalam analisisnya, dia memahami bahwa persesuaian dengan suatu objek tidak mungkin dapat dibuktikan. Hal ini karena satu-satunya ukuran dalam berpikir adalah kegunaannya. (Najmuddin & Syarkawi, 2021; Vaihinger & Rosenthal, 2021) Dalam narasi yang dibangun oleh Vaihinger ini, esensi terpenting dimuka bumi ini adalah kegunaannya.

Kurikulum merdeka belajar yang digagas oleh kementerian pendidikan didominasi atas konstruksi filsafat progresivisme (Faiz & Kurniawaty, 2020). Hal ini terlihat dari tujuan akhir dan kebijakan-

kebijakan yang diambil oleh kementerian untuk menekankan pada praksis-praksis yang progresif dan bersesuaian dengan perkembangan teknologi-teknologi global. Metodologi berpikir inilah yang menyebabkan kurikulum merdeka belajar sangat kental dari narasi-narasi progresivisme yang dituangkan John Dewey (Arifin, 2020; Englund, 2000; Labaree, 2005; Waks, 2013). Sehingga tujuan akhir dalam kurikulum ini adalah kebebasan yang bersifat progresif-humanistik. (Mustaghfiroh, 2020) Hal ini sedikit besar terlihat bagaimana implementasi yang dilakukan kurikulum merdeka belajar dalam memunculkan konsep-konsep seperti perluasan waktu belajar diluar mata pelajaran dan dimunculkan pendidikan berbasis proyek yang merupakan suatu ikhwal besar untuk mencapai pemahaman pendidikan yang tidak terikat pada suatu paradigma yang kaku dan kolot. (Nanggala & Suryadi, 2021) Sehingga, kurikulum merdeka menjadi kurikulum yang harus relevan dengan kebutuhan global baik dari segi industri maupun sosial. Hal ini dikarenakan, tujuan utamanya adalah mencetak lulusan-lulusan yang memiliki kapabilitas dalam melakukan suatu tindakan konstruktif, progresif, dan juga kritis dalam menanggapi suatu problematika. (Sopacua & Fadli, 2022)

Pada pembahasan yang telah dikemukakan diatas, telah ditemui dua model filsafat yang saling membentuk dan membangun paradigma kebijakan pendidikan kurikulum merdeka belajar. Dari kedua model tersebut, filsafat progresivisme dan pragmatisme yang dikembangkan oleh John Dewey mendominasi warna kurikulum merdeka belajar. Dalam tulisan ini, kita akan secara spesifik mendekonstruksi dan mengkaji bagaimana orientasi dan kritik yang berkembang dalam diskursus kebijakan Development Curriculum John Dewey (kurikulum perkembangan) (Arjaya et al., 2022; Dewey, 1964; Roqib et al., 2021; Waks, 2013).

### **Tinjauan Dekonstruktif terhadap Filsafat Kebijakan Merdeka Belajar**

John Dewey yang merupakan salah satu tokoh progresivisme dalam berbagai tulisan-tulisannya dan juga wacananya mencoba mengembangkan kurikulum yang relevan dengan peserta didik. (Dewey, 1964) Dia menamakan kurikulum ini sebagai *Development Curriculum* atau kurikulum perkembangan peserta didik yang lebih menitikberatkan pendidikan yang sesuai jaman dan sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik itu sendiri. (Holt, 2020) Kurikulum ini bersandingan dengan prinsip progresivisme dan pragmatism yang dikembangkan olehnya, karena tujuan pembelajaran dari kurikulum ini adalah meluaskan *scope* dan fokus peserta didik kepada bagian-bagian yang diminati mereka. (Novianti et al., 2022) Sehingga, dalam penerapannya di sekolah, Dewey memandang bahwa esensi kurikulum ini harus selalu *update* dan berbasis pada kebutuhan peserta didik ketimbang sebaliknya, di mana peserta didik dituntut mengikuti kemauan sistem pendidikan yang berlaku. (Sikandar, 2015) Konsep yang berkembang dalam kurikulum Dewey ini memiliki kesamaan yang sangat tinggi dengan gagasan merdeka belajar yang dikembangkan oleh menteri pendidikan Nadiem Makarim.

Namun perlu dipahami, gagasan kurikulum Dewey ini tidak diterapkan di negeri asalnya sendiri yaitu Amerika serikat. Dalam perjalanan 100 tahun kurikulum Amerika serikat, komite pendidikan nasional AS lebih menggunakan teori efisiensi sosial yang dikembangkan oleh David Samuel Snedden ketimbang teorinya Dewey. (Labaree, 2010) Dalam perkembangannya, Irving Babbit salah seorang tokoh intelektual Amerika menilai bahwa Dewey telah terperangkap pada pengasumsian bahwa humanitarian itu sama seperti humanisme. Karena dalam praktiknya, humanisme hanya mempedulikan tentang urusan individual dan dirinya sendiri. Sementara sebaliknya, humanitarian lebih mempedulikan urusan kesejahteraan dan kemajuan umat manusia secara utuh. Sehingga idealisme-idealisme yang dia kembangkan ini tidak efisien dalam perkembangan dan pertumbuhan peserta didik. (Smilie, 2019) Selain itu, kurikulum Dewey dinilai tidak bersesuaian dengan agenda-agenda nasional AS, sehingga memberikan ruang bagi teori efisiensi sosial untuk bangkit dan memimpin kebijakan pendidikan nasional Amerika, karena hal itu dinilai masih sejalan dengan ide-ide dan juga agenda nasional Amerika (Tahirsylaj, 2017)

Bahkan pada paruh akhir abad 20 di AS, konsep pedagogik dan kurikulum Thorndike berhasil menguasai sebagian besar model pendidikan nasional di AS. (Tomlinson, 1997) Dalam analisisnya, Thorndike memahami bahwa esensi administrasi pendidikanpun sangatlah mempengaruhi konstruksi kebijakan pendidikan secara utuh. Sehingga tidak banyak membicarakan peserta didik namun perlu pula dirumuskan bangunan pendidikan yang kokoh agar peserta didik bisa bernaung didalamnya. (Labaree, 2005) Kurikulum Thorndike ini juga mengeliminasi faktor bawaan yang dimiliki peserta didik seperti moral, sosial, ekonomi dan politik dalam pembelajaran. Sehingga peserta didik belajar bukan

karena faktor tadi melainkan karena murni kemampuan pengajaran dikelas yang dalam visi Thorndike merata. (HORN JR, 2007)

Dari apa yang telah dipaparkan diatas, maka intisari yang kita dapat temui bahwasnya terdapat berbagai macam kritikan-kritikan yang dilakukan oleh tokoh pendidikan di Amerika Serikat, tempat John Dewey hidup mengenai wacana yang telah dikembangkan olehnya. Hal ini memberikan kita sebuah gambaran bahwa kurikulum berbasis filsafat progresivisme Dewey telah didekonstruksi oleh rekan sejawat. Maka pertanyaan sekarang apakah kita memerlukan sebuah upaya dan ide baru untuk menyusun wacana filsafat kebijakan pendidikan nasional. Ataukah kita tetap bertahan pada visi dari filsafat progresivisme dan pragmatis yang dikembangkan oleh John Dewey (Biesta, 2009; Kadlec, 2006; Papastephanou, 2017).

### **Reorientasi dan Rekonstruksi Filsafat Kebijakan Merdeka Belajar berbasis Ilmu Sosial Profetik**

Kebijakan pendidikan nasional yang menjadikan pragmatisme sebagai akar epistemologinya akan mengalami dehumanisasi melalui berbagai macam tumpang tindih kebijakan yang dinilai dan dianggap jangka pendek dan menengah (Kadlec, 2006; Kuntowijoyo, 2006; Labaree, 2010). Sementara pendidikan islam menghendaki sebuah pendidikan jangka panjang yang menjadikan seseorang untuk terus belajar dan berinovasi dari waktu ke waktu. Maka upaya untuk menjadikan epistemologi islam sebagai arah kebijakan nasional telah dilakukan beberapa negara (Alfiana & Budiantoro, 2021; Roqib et al., 2021).

Salah satu negara yang muncul dalam diskursus ini adalah Malaysia yang mencoba mengembangkan idealisme islamisasi ilmu milik Al-Attas dan Al-Faruqi sebagai landasannya (Furoidah, 2020). Wacana ini dikembangkan dengan tujuan memurnikan ilmu-ilmu non keagamaan terhadap sekularisme dalam pandangan islamisasi ilmu Al-Attas dan mengintegrasikan ilmu-ilmu non keagamaan berbasis Al-Qur'an dan Sunnah dalam pandangan islamisasi ilmu Al-Faruqi. Namun kesemua itu masih menuju satu diskursus yang sama bahwasnya diperlukan upaya untuk menetralsir epistemologi barat dan memposisikan epistemologi pendidikan islam sebagai basisnya (Al-Attas, 2005, 2014; Al-Faruqi, 1992; Fauzi, 2017; Mahsus & Wijaya, 2022).

Hal ini ditentang oleh Kuntowijoyo dalam bukunya Islam sebagai Ilmu . Dalam wacana yang dikembangkan Kuntowijoyo, ilmu pada hakikatnya merupakan barang yang dapat dipakai semua orang tanpa memandang siapa yang membuat dan menggunakannya. Sebaliknya, islam sebagai agama yang berbasis rahmatan lil al-aamiin (rahmat bagi alam semesta) menjadikan sumber yang telah dipegang dan disepakati yaitu: Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar epistemologis berpijaknya pemikir muslim dalam pencarian keilmuannya. Sehingga bukan sebuah realitas yang dihubung-hubungkan dengan Al-Qur'an. Melainkan sebaliknya, Al-Qur'an yang dijadikan dasar dari perkembangan peradaban zaman (Kuntowijoyo, 1994, 2001; Ramadhan & Fuad, 2023; Ramadhan & Lismawati, 2022).

Untuk mencapai ini semua menurut Kuntowijoyo, diperlukan sebuah Ilmu Sosial Profetik (ISP) sebagai dalil utama pergerakan umat islam untuk mengobjektifikasi ilmu yang ada di alam dunia ini. Hal ini perlu dilakukan agar umat islam menjadikan sumber yang pasti itu dapat dirasakan oleh semua manusia. Maka daripadanya membangun kurikulum merdeka belajar dengan basis profetik merupakan sebuah ihwal kecil untuk menuju pada inklusivitas islam dalam menjawab zaman (Briando, 2017; Kuntowijoyo, 2006; Ramadhan & Fuad, 2023; ZTF, 2011).

Seperti yang telah dipaparkan diatas, kebijakan yang muncul dalam kurikulum merdeka belajar bercorak filsafat humanisme-progresivisme milik John Dewey. Hal ini tentunya membuat sebagian orang menolak untuk menerapkan kurikulum baru ini, karena dinilai sarat akan epistemologi barat. Sehingga muncullah wacana mengganti dan berbagai macamnya, namun disini peneliti mencoba melakukan pendekatan lain. Bagaimana jika kita mencoba menggunakan prinsip ISP sebagai filsafat kita dalam menafsirkan kurikulum merdeka belajar ini, sehingga bukan epistemologi baratnya yang kental, melainkan sintesis yang telah dikembangkan oleh Kuntowijoyo dalam memadukan epistemologi barat dan timur.

Jika kita menilai dari argumentasi sebelumnya bahwa, filsafat yang dikembangkan oleh menteri pendidikan adalah humanisme-progresivisme. Maka sekarang bagaimana kalau filsafat itu dirubah menggunakan paradigma ISP. Seperti yang kita ketahui, wacana pokok atau dasar yang diambil oleh Kuntowijoyo dalam mengembangkan ISP termaktub pada surah Al-Imran ayat: 110. Dalam ayat

tersebut, terdapat 3 kata kunci yang harus diperhatikan yaitu: Amar ma'aruf (berbuat baik yang ditafsirkan oleh Kuntowijoyo sebagai humanisme); Nahi munkar (menolak kemungkaran yang ditafsirkan oleh Kuntowijoyo sebagai liberasi); dan tu'minuna billah (beriman kepada Allah yang ditafsirkan oleh Kuntowijoyo sebagai transendensi) (Kuntowijoyo, 2001; Permana, 2021; Ramadhan & Lismawati, 2022) Ketiga konsep ini saling mempengaruhi satu sama lain, jika ketiganya tidak ditunaikan maka akan terjadi sebuah ketidakseimbangan antara ketiganya. (Arum, 2018) Hal ini terlihat bagaimana jika humanisme saja yang ditegaskan, maka tidak ada bedanya pemikiran liberalisme dan sebaliknya. Hal ini mencoba menekankan bahwa, Kuntowijoyo menginginkan proses keseimbangan dalam teori ISP yang dia kembangkan. Sehingga dimensi kemanusiaan, pembebasan, dan ketuhanan dapat dilaksanakan tanpa mengorbankan salah satunya. (A'yuni & Hijrawan, 2021; Kuntowijoyo, 2001; Masduki, 2017)

Isu yang telah disampaikan oleh Kuntowijoyo jauh hari tersebut nampaknya masih belum dapat diimplementasikan dalam praktik kurikulum pendidikan modern. Hal ini terlihat dari bagaimana humanisme-progresivisme mendominasi paradigma pemikiran pendidikan Indonesia. Padahal jika kita mau menerapkan teori yang dirumuskan oleh Kuntowijoyo ini, penafsiran kurikulum merdeka belajar akan lebih mudah diterima oleh masyarakat dan para ahli, dikarenakan upaya untuk mengilmukan apa yang telah termaktub dan ditegaskan pada sumber hukum Islam yang pasti. (Telaumbanua et al., 2022) Intisari dan aspek utama dari ISP ini sendiri merupakan sebuah rekoniliasi antara epistemologi barat dan timur untuk berdamai serta berasimilasi membentuk identitas baru yang dinamakan Kuntowijoyo sebagai ISP (Wulansari & Khotimah, 2020).

Pada hakikatnya penggunaan filsafat yang dikembangkan Kuntowijoyo dalam ISP merupakan ihwal awal dari upaya menciptakan filsafat kebijakan kurikulum merdeka belajar yang berorientasikan pada nilai profetik. Sekalipun belum cukup menjawab masalah-masalah yang ada di dalam kebijakan pendidikan nasional yang ada di Indonesia. Maka tidak ada salahnya, bahwa ISP dapat digunakan untuk menjadi landasan filsafat yang dikembangkan menteri pendidikan dengan harapan mampu membangun pendidikan yang secara vertikal dan horizontal terbentang secara eksponensial. Tentunya, penelitian ini tidak melakukan sebuah klaim bahwasanya ISP merupakan suatu paradigma absolut dan kuat secara aplikasinya. Namun jika kita komparasikan dengan filsafat kebijakan kurikulum merdeka belajar yang berkembang maka, konsep ISP ini masih bisa diterima oleh kalangan awam dan ahli pendidikan nasional yang mencoba memunculkan kepaduan dan universalitas dalam pengembangan diskursus pendidikannya.

## Kesimpulan

Kesimpulan Penelitian ini menekankan pentingnya merekonstruksi dan mengevaluasi kembali dasar-dasar filosofis kurikulum Merdeka Belajar, yang saat ini sangat dipengaruhi oleh epistemologi pendidikan Barat. Meskipun pendekatan konstruktivis kurikulum ini mendorong pendidikan yang progresif, kurikulum ini sering mengabaikan dan gagal untuk memasukkan tradisi pendidikan Indonesia yang telah berlangsung lama. Efisiensi dan relevansi kurikulum dapat terhambat oleh kesenjangan antara teori pendidikan yang diimpor dan nilai-nilai budaya asli. Penelitian ini bermaksud untuk membuka jalan bagi kebijakan pendidikan yang lebih baik secara filosofis dan relevan secara kontekstual dengan mengatasi hal ini.

Dari penelitian diatas, kita temukan bahwasanya, konsep kebijakan merdeka belajar yang bermuara pada pemikiran pendidikan John Dewey telah didekonstruksi oleh rekan-rekan sejawatnya seperti David Samuel Snedden yang mengenalkan teori efisiensi sosial dan Thorndike yang lebih konstruktif dalam menjabarkan pemikirannya kurikulumnya. Dimana kedua tokoh ini dapat memberikan sebuah peta biru pendidikan peserta didik dari awal hingga akhir. Lalu, penelitian ini juga mengkaji penggunaan ilmu sosial profetik, dimana kesimpulan yang didapat adalah teori ilmu sosial profetik ini secara umum bersesuaian dengan kebutuhan pendidikan nasional yang bersendikan pada keimanan dan keilmiahan. Lalu, dalam teori ini pula, terdapat cetak biru yang terukur dan terarah bagi peserta didik. Sehingga ilmu sosial profetik dapat diterapkan sebagai dasar filsafat kebijakan merdeka belajar yang baru.

Berdasarkan ilmu sosial profetik Kuntowijoyo, yang mengedepankan filosofi pendidikan yang humanis, liberatif, dan transenden, kurikulum Merdeka Belajar direkomendasikan untuk direkonstruksi. Tujuan dari kerangka kerja yang didesain ulang ini adalah untuk membuat kurikulum yang relevan dan transformatif dengan menyelarkannya dengan konteks sosial budaya Indonesia. Kerangka kebijakan

yang baru ini berupaya untuk mengembangkan sistem pendidikan yang seimbang yang mendorong penyelidikan ilmiah, integritas moral, dan tanggung jawab etis dengan memasukkan ide-ide ilmu sosial profetik. Pada akhirnya, strategi pendidikan yang telah direvisi ini mempertahankan hubungan yang kuat dengan kekayaan budaya masa lalu Indonesia sekaligus menjanjikan pendidikan yang lebih baik bagi para siswa untuk menghadapi tantangan kehidupan kontemporer.

### Daftar Pustaka

- A'yuni, S. Q., & Hijrawan, R. (2021). Membaca Pemikiran Kuntowijoyo dalam Hubungan Ilmu dan Agama Perspektif Islam. *Qalamuna: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Agama*, 13(1), 129-144. <https://doi.org/10.37680/qalamuna.v13i1.568>
- Ahida, R. (2022). William James Pragmatism And Modern Human Religiousity. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 3334-3343.
- Al-Attas, S. M. N. (2005). Islamic philosophy: An introduction. *Journal of Islamic Philosophy*, 1(1), 11-43.
- Al-Attas, S. M. N. (2014). *Prolegomena to the Metaphysics of Islam*. Penerbit UTM Press.
- Al-Faruqi, I. R. (1992). *Al Tawhid: Its implications on thought and life* (Issue 4). IIIT.
- Alfiana, N., & Budiantoro, W. (2021). Al-Quran Dan Budaya Profetik: Mencetak Insan Kamil Di Era Milenial. *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 13. <https://doi.org/10.30596/intiqad.v13i2.7600>
- Anggara, A., Amini, A., Faridah, F., Siregar, M., Faraiddin, M., & Syafrida, N. (2023). Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada Satuan Pendidikan Jenjang SMP. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 1899-1904.
- Arifin, N. (2020). Pemikiran Pendidikan John Dewey. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 2(2), 168-183. <https://doi.org/10.47467/as.v2i2.128>
- Arjaya, I. B. A., Suastra, I. W., Budiningsih, D. N., & Hermawan, I. M. S. (2022). What Kind Of Philosophy Underlies The Future Curriculum For Indonesia? *International Journal of Applied Science and Sustainable Development (IJASSD)*, 4(1), 14-23.
- Arum, K. (2018). Pengembangan Pendidikan Agama Islam Berbasis Sosial Profetik (Analisis Terhadap Pemikiran Kuntowijoyo). *Millah: Jurnal Studi Agama*, 177-196. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss2.art2>
- Badar, M. Z. (2020). Konsep Integrasi antara Islam dan Ilmu Telaah Pemikiran Kuntowijoyo. *An-Nas*, 4(1), 45-58.
- Biesta, G. (2009). Witnessing deconstruction in education: Why quasi-transcendentalism matters. *Journal of Philosophy of Education*, 43(3), 391-404. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9752.2009.00705.x>
- Briando, B. (2017). Prophetical law: Membangun hukum berkeadilan dengan kedamaian. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 325-336.
- Derrida, J. (2016). *Of grammatology*. Jhu Press.
- Dewey, J. (1964). *The child and the curriculum*. University of Chicago Press Chicago.
- Englund, T. (2000). Rethinking democracy and education: towards an education of deliberative citizens. *Journal of Curriculum Studies*, 32(2), 305-313. <https://doi.org/10.1080/002202700182772>
- Fadli, R. V. (2020). Tinjauan Filsafat Humanisme: Studi Pemikiran Paulo Freire Dalam Pendidikan. *Reforma: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 9(2), 96-103.
- Fahmi, S. F. S. F. S. (2023). Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. *At-Tadris: Journal of Islamic Education*, 2(2), 92-97.
- Faiz, A., & Kurniawaty, I. (2020). Konsep Merdeka Belajar Pendidikan Indonesia Dalam Perspektif Filsafat Progresivisme. *Konstruktivisme: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 12(2), 155-164.
- Fauzi, A. (2017). Integrasi Dan Islamisasi Ilmu Dalam Perspektif Pendidikan Islam. In *Jurnal Pendidikan Islam Uhamka* (Vol. 8, Issue 1).
- Freire, P. (1996). Pedagogy of the oppressed (revised). *New York: Continuum*, 356, 357-358.
- Furoidah, N. L. (2020). Islam dan Sains: Telaah Terhadap Islamisasi Ilmu Pengetahuan, Pengilmuan Islam dan Paradigma Integrasi Interkoneksi-Transintegrasi Ilmu. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 7(2), 254-269.
- Hasbullah, H. (2020). Pemikiran Kritis John Dewey Tentang Pendidikan. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 10(1).
- Holt, L. (2020). *John Dewey: A look at his contributions to curriculum*.
- HORN JR, R. A. (2007). Edward L. Thorndike. *The Praeger Handbook of Education and Psychology*, 1, 225-230.
- James, W. (2020). Pragmatism. In *Pragmatism* (pp. 53-75). Routledge.
- Kadlec, A. (2006). Reconstructing Dewey: The philosophy of critical pragmatism. *Polity*, 38(4), 519-542. <https://doi.org/10.1057/palgrave.polity.2300067>



- Kemdikbud. (2022a). *Kurikulum Darurat*. Kurikulum Kemdikbud. <https://kurikulum.kemdikbud.go.id/kurikulum-darurat/>
- Kemdikbud. (2022b). *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Kuntowijoyo. (1994). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi*. Bandung: Penerbit Mizan.
- Kuntowijoyo. (2001). Muslim Tanpa Masjid: Esai-Esai Agama. *Budaya, Dan Politik Dalam Bingkai Strukturalisme Transendental (Bandung: Mizan, 2001)*.
- Kuntowijoyo. (2006). *Islam sebagai ilmu : epistemologi, metodologi, dan etika* (2nd ed.). Tiara Wacana.
- Labaree, D. F. (2005). Progressivism, schools and schools of education: An American romance. *Paedagogica Historica*, 41(1-2), 275-288.
- Labaree, D. F. (2010). How Dewey lost: The victory of David Snedden and social efficiency in the reform of American education. In *Pragmatism and modernities* (pp. 163-188). Brill.
- Mahsus, M., & Wijaya, B. A. (2022). Pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi Mengenai Islamisasi Ilmu Pengetahuan. *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 5(1), 11-19.
- Masduki, M. (2017). Pendidikan profetik; Mengenal gagasan ilmu sosial profetik Kuntowijoyo. *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 9(1), 1-22.
- Maslow, A. H. (1958). *A Dynamic Theory of Human Motivation*.
- Mawaddah, S. M., & Roekhan, R. (2021). Pertarungan Ideologi dalam Wacana "Merdeka Belajar." *Madah: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 12(1), 103-117.
- Mustaghfiroh, S. (2020). Konsep "merdeka belajar" perspektif aliran progresivisme John Dewey. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 3(1), 141-147.
- Najmuddin, N., & Syarkawi, S. (2021). Progresivisme (Konsepsi Tentang Realita dan Pengetahuan): Progresivisme (Konsepsi Tentang Realita dan Pengetahuan). *VARIASI: Majalah Ilmiah Universitas Almuslim*, 13(2).
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2021). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Aliran Filsafat Pendidikan Progresivisme dan Perenialisme. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 14-26.
- Nasution, A. G. J. (2020). Diskursus merdeka belajar perspektif pendidikan humanisme. *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab*, 6(1), 107-121.
- Novianti, R., Copriady, J., & Firdaus, L. N. (2022). Parenting di Era Digital: Telaah Pandangan Filsafat Progresivisme John Dewey. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(6), 6090-6101.
- Papastephanou, M. (2017). Learning by undoing, democracy and education, and John Dewey, the colonial traveler. *Education Sciences*, 7(1), 20.
- Permana, A. K. (2021). Paradigma al-Qur'an Menjawab Realitas Arab Jahiliyah Perspektif Ilmu Sosial Profetik. *Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal Al-Syakhsiyyah*, 6(1), 16-32.
- Ramadhan, A. R., & Fuad, A. F. N. (2023). Religious Authority in Islamic Law: A Debate on Conservative and Progressive Methods. *Afkaruna: Indonesian Interdisciplinary Journal of Islamic Studies*, 19(1). <https://doi.org/10.18196/afkaruna.v19i1.18507>
- Ramadhan, A. R., & Lismawati. (2022). *Prophetic Approach dalam Kebijakan Pendidikan Indonesia : Studi Analisis Teori Sosial Profetik Kuntowijoyo*. 13(2), 89-96. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jpi/article/view/10498>
- Rochmiyati, S., Supriadi, D., Irfan, M., Lestari, D. P., Sari, N. H. I., Kusumadewi, V., Prayogi, I. E., & Wibowo, K. A. (2023). IMPLEMENTASI ASAH-ASIH-ASUH DALAM PENGELOLAAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM). *JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT*, 11(1), 290-296.
- Rogers, C. (2000). Person-centred therapy. *Six Key Approaches to Counselling and Therapy*, 1, 98-105.
- Rohmah, N. N. S., Muckromin, A., & Fauziyati, E. (2022). FILSAFAT HUMANISME DAN IMPLIKASINYA DALAM KONSEP MERDEKA BELAJAR. *JURNAL MITRA SWARA GANESHA*, 9(2), 135-143.
- Roqib, M., Sarah, S., Sabiq, A. H. A., Sobirin, M., & Harimi, A. C. (2021). Criticizing Higher Education Policy in Indonesia: Spiritual Elimination and Dehumanisation. *Nadwa: Jurnal Pendidikan Islam*, 15(1), 61-86.
- Sabaruddin, S. (2020). Sekolah dengan konsep pendidikan humanis. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 20(2), 147-162.
- Sikandar, A. (2015). John Dewey and his philosophy of education. *Journal of Education and Educational Development*, 2(2).
- Smilie, K. D. (2019). Irving Babbitt and the Service-Learning Ethic: An Early Critique of Deweyan Progressivism. *Michigan Journal of Community Service Learning*, 25(1), 55-61. <https://doi.org/10.3998/mjcsloa.3239521.0025.105>

- Sopacua, J., & Fadli, M. R. (2022). Konsep Pendidikan Merdeka Belajar Perspektif Filsafat Progressivisme (The Emancipated Learning Concept of Education in Progressivism Philosophy Perspective). *Potret Pemikiran*, 26(1), 1–14.
- Sopiansyah, D., Masrurroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34–41.
- Sumantri, B. A., & Ahmad, N. (2019). Teori Belajar humanistik dan Implikasinya terhadap pembelajaran pendidikan agama islam. *Fondatia*, 3(2), 1–18.
- Susilawati, N. (2021). Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka Dalam Pandangan Filsafat Pendidikan Humanisme. *Jurnal Sikola: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 2(3), 203–219.
- Syahrir, N., Firdaus, A. M., Nasir, N., Akram, A., Amal, A., & Nur, M. (2023). Evaluasi Program Implementasi Mbkm-Pertukaran Pelajar. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2977–2985.
- Tahirsylaj, A. (2017). Curriculum field in the making: Influences that led to social efficiency as dominant curriculum ideology in progressive era in the US. *European Journal of Curriculum Studies*, 4(1), 618–628.
- Telaumbanua, Y., Yalmiadi, Y., & Ritmi, T. (2022). The MECRI Nadiem Makarim's "Freedom of Learning": A Critical Study of John Dewey's Pragmatic Philosophy. *Modality Journal: International Journal of Linguistics and Literature*, 2(1), 1–15.
- Thaib, R. M. T. R. M. (2018). Pragmatisme: Konsep Utilitas Dalam Pendidikan. *Intelektualita*, 4(1).
- Tomlinson, S. (1997). Edward Lee Thorndike and John Dewey on the science of education. *Oxford Review of Education*, 23(3), 365–383. <https://doi.org/10.1080/0305498970230307>
- Utomo, S. T., & Ifadah, L. (2020). Filsafat Progressivisme dan Implikasinya bagi Pendidikan Islam. *Wahana Islamika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 94–110.
- Vaihinger, H., & Rosenthal, M. A. (2021). *The philosophy of as if*. Routledge.
- Vhalery, R., Setyastanto, A. M., & Leksono, A. W. (2022). Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Sebuah Kajian Literatur. *Research and Development Journal of Education*, 8(1), 185–201.
- Waks, L. J. (2013). John Dewey and the Challenge of Progressive Education. *International Journal of Progressive Education*, 9(1).
- Wardhana, I. P., & Pratiwi, V. U. (2020). *Konsep Pendidikan Taman Siswa Sebagai Dasar Kebijakan Pendidikan Nasional Merdeka Belajar di Indonesia*.
- Wulansari, P., & Khotimah, N. (2020). Membumikan Ilmu Sosial Profetik: Reaktualisasi Gagasan Profetik Kuntowijoyo dalam Tradisi Keilmuan di Indonesia. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2, 431–435.
- Yasmansyah, Y. (2022). Konsep Merdeka Belajar Kurikulum Merdeka. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 1(1), 29–34.
- ZTF, P. B. (2011). Prophetic social sciences: toward an Islamic-based transformative social sciences. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 1(1), 95–121. <https://doi.org/10.18326/ijims.v1i1.95-121>